

**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggaran Belanja Modal**

**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama : Tassa Amirah Sari

No. Mahasiswa : 18312216

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggaran Belanja Modal Pemerintah**

**Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera**

**SKRIPSI**

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Tassa Amirah Sari

No. Mahasiswa : 18312216

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 25 Februari 2022

Penulis



METERAI  
TEMPEL  
10000  
4988DAJX591405857

Tassa Amirah Sari

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota Se-Sumatera**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Tassa Amirah Sari  
No. Mahasiswa : 18312216  
Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 22 Februari 2022

Dosen Pembimbing,

Skripsi siap diuji



(Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera

Disusun oleh : TASSA AMIRAH SARI

Nomor Mahasiswa : 18312216

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Senin, 04 April 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kelemahan maupun kekurangan, serta telah melewati segala macam tantangan dan hambatan dengan perasaan suka maupun duka. Banyak kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyusunan skripsi ini yang sangat dibutuhkan penulis demi kesempurnaan penyusunannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, karunia, dan ridho serta Kesehatan kepada penulis sehingga penulis memiliki kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Mahmudi, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan tambahan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Samsuri dan Ibu Msy. Kurnia Ekawati yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga yang tidak akan pernah tergantikan dan terbalaskan, serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan hingga sampai saat ini.
7. Seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman seperjuangan dari semester satu, Sylvania Dwi Yulianti terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan dengan canda tawa, bahagia, suka duka dari semester 1 sampai akhir studi. Semoga pertemanan ini bisa terus berlanjut dengan baik sampai kapanpun, walaupun nanti setelah lulus akan memiliki kesibukan masing-masing.
9. Teman-teman semua yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, maka dari itu saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.



*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Februari 2022

Penulis



Tassa Amirah Sari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
2.2 Otonomi Daerah.....	8
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	9
2.4 Belanja Modal .....	9
2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	12
2.6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	13

2.7	Luas Wilayah .....	14
2.8	Ukuran Legislatif .....	15
2.9	Penelitian Terdahulu .....	16
2.10	Pengembangan Hipotesis.....	22
2.10.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Belanja Modal .....	22
2.10.2	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal.....	24
2.10.3	Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Anggaran Belanja Modal .....	25
2.10.4	Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Anggaran Belanja Modal ..	26
2.11	Kerangka Pemikiran.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>28</b>
3.1	Populasi dan Sampel .....	28
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	28
3.2.1	Variabel Dependen.....	29
3.2.2	Variabel Independen .....	29
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	30
3.4	Metode Analisis Data .....	30
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	31
3.4.2	Analisis Regresi Linear Berganda .....	31
3.4.3	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	32
3.4.4	Uji t.....	32
3.4.5	Uji Asumsi Klasik.....	32

<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	36
4.2 Analisis Statistik .....	37
4.2.1 Uji Normalitas .....	38
4.2.2 Uji Multikolinearitas .....	39
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	40
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	40
4.3.1 Koefisien Determinasi.....	43
4.3.2 Uji t.....	44
4.4 Pembahasan .....	45
4.4.1 Pengaruh PAD Terhadap Anggaran Belanja Modal .....	45
4.4.2 Pengaruh SiLPA Terhadap Anggaran Belanja Modal .....	46
4.4.3 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Anggaran Belanja Modal .....	47
4.4.4 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Anggaran Belanja Modal ..	48
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4.1 Jumlah Data.....	35
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	36
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas .....	38
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	39
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda .....	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	43
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas.....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Anggaran Belanja Modal.....	55
Lampiran 2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	61
Lampiran 3 Data Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	67
Lampiran 4 Data Luas Wilayah .....	73
Lampiran 5 Data Ukuran Legislatif (Jumlah Anggota DPRD) .....	79
Lampiran 6 Hasil Statistik Deskriptif.....	85
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas.....	85
Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinearitas .....	86
Lampiran 9 Scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas .....	87
Lampiran 10 Koefisien Determinasi .....	87
Lampiran 11 Hasil Uji t.....	88

## ABSTRAK

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu hal penting dalam mengelola keuangan daerah. APBD menjadi dasar dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu pos anggaran di dalam APBD yang perlu ditingkatkan yaitu belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi anggaran belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada periode 2017-2019. Terdapat empat variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, dan Ukuran Legislatif. Jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada periode 2017 - 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah, dan Ukuran Legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Hal ini berarti semakin tinggi PAD, semakin besar Luas Wilayah, dan semakin besar ukuran legislatif kemungkinan akan meningkatkan anggaran belanja modal. Namun, SiLPA tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, hal ini berarti besarnya SiLPA tidak memengaruhi besaran anggaran belanja modal.

**Kata Kunci:** Anggaran Belanja Modal; Pendapatan Asli Daerah; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; Luas Wilayah; Ukuran Legislatif.



## **ABSTRACT**

*The process of preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is one of the important things in managing regional finances. The APBD is the basis for implementing development programs and public services. One of the budget items in the APBD that needs to be increased is capital expenditure. This study aims to determine the factors that affect the capital expenditure budget in districts/cities throughout Sumatra in the 2017-2019 period. There are four independent variables in this study, namely Regional Original Revenue (PAD), Remaining Budget Calculation (SiLPA), Area Size, and Legislative Size. The type and research method used in this research is quantitative. The population in this study were all district/city governments in Sumatra in the 2017 - 2019 period. The sampling technique in this study used the purposive sampling method, namely sampling based on certain criteria. The results of this study indicate that Regional Original Revenue, Area, and Legislative Size have a significant positive effect on the Capital Expenditure Budget. This means that the higher the PAD, the larger the Area, and the larger the legislative size is likely to increase the capital expenditure budget. However, SiLPA does not affect the capital expenditure budget, this means that the SiLPA does not affect the capital expenditure budget.*

**Keywords:** *Capital Expenditure Budget; Regional Original Revenue; Budget Calculation Over Remaining; Area; Legislative Size.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era reformasi publik yang ditandai dengan perubahan dari bentuk pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, memberikan dampak bagi pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan suatu kebijakan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah, serta menetapkan sendiri alokasi sumber daya agar dapat dipergunakan untuk belanja daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah yang dimasukkan dalam anggaran daerah. Untuk melihat bagaimana pemerintah daerah dalam mengurus sendiri pemerintahannya dapat dilihat dari penerapan penganggaran program dan kegiatan pemerintah sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana publik (Rizqiyati et al., 2019).

Setiap daerah otonom diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri daerahnya termasuk itu mengelola keuangan daerah, seperti mengelola anggaran daerahnya yang akan digunakan untuk pembangunan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah itu sendiri yang lebih tahu kebutuhan dari daerahnya dan pelayanan masyarakat yang harus diberikan di daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi pemerintah

daerah pun dituntut agar dapat lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan daerahnya agar tetap terkontrol secara efisien dan efektif.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu hal penting dalam mengelola keuangan daerah. APBD menjadi dasar dalam pelaksanaan program pelayanan dan pembangunan publik. Pos anggaran dalam APBD yang perlu ditingkatkan salah satunya yaitu belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal digunakan dalam pembentukan modal untuk meningkatkan aset tetap jangka panjang yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal memiliki arti penting yang dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat yaitu kegiatan pengadaan infrastruktur yang mana akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dikarenakan perbedaan kondisi geografis antar daerah dan terjadinya pergerakan penduduk yang tinggi, maka belanja modal perlu diperhatikan guna program pembangunan infrastruktur daerah.

Penyusunan rencana kerja yang dibiayai dari APBD memiliki jangka waktu yang panjang dan dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai, sehingga dibutuhkan kompromi antara *budget actor* yang mempunyai preferensi yang berbeda. Dalam penetapan anggaran pemerintah daerah, kadang kala sering mengalami ketidaktepatan dalam penyusunan dan perencanaan anggaran sehingga diperlukan penyesuaian anggaran pada saat implementasinya. Penyesuaian anggaran pada tahun berjalan merupakan hal biasa yang terjadi di pemerintahan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara yang memiliki perbedaan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, di mana beberapa daerah justru

akan mengalami masalah keuangan (Junita & Abdullah, 2016). Revisi anggaran dilakukan untuk mengantisipasi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah daerah.

Penelitian yang membahas mengenai anggaran belanja modal ini merupakan salah satu topik yang menarik untuk diteliti di Indonesia. Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintah pusat menghimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan, rata-rata belanja daerah yang digunakan lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal. Apabila pemerintah daerah dapat mengurangi belanja pegawai seperti pengurangan perjalanan dinas, maka kualitas belanja daerah akan semakin baik dan nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk alokasi belanja modal guna meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat (Rizqiyati et al., 2019). Peningkatan belanja modal diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomis, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mampu memberikan keuntungan yang nantinya dapat digunakan sebagai penerimaan kembali bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belanja modal sangat penting dalam menunjang pembangunan sarana dan prasarana suatu daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, maka setiap pemerintah daerah seharusnya bisa lebih

mengoptimalkan belanja modal untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publiknya.

Penelitian mengenai anggaran belanja modal ini memang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi penelitian ini akan menampilkan kebaruan data dari penelitian sebelumnya karena setiap tahunnya kebutuhan dari setiap daerah itu akan berbeda-beda. Kebaruan pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di level pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menguji variabel-variabel yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh penelitian terdahulu dengan hasil penelitian berikut yang menggunakan data sekunder sesuai dengan kondisi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kualitas penyusunan APBD dengan cara memperlihatkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi anggaran belanja modal sehingga pemerintah dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penyusunan anggaran melalui faktor-faktor yang berpengaruh atau kecenderungan dalam menggunakan anggaran belanja modal untuk alokasi belanja pegawai, atau membelanjakan belanja modal tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari daerahnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi anggaran belanja modal maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi anggaran belanja modal, maka rumusan masalah yang penulis dapatkan adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?
2. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?
3. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?
4. Apakah Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh Luas Wilayah terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera.

4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Legislatif terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai faktor yang dapat memengaruhi anggaran belanja modal.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan berkaitan dengan pembangunan daerah kedepannya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur penelitian selanjutnya mengenai anggaran belanja modal.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Teori utama yang mendasari dan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Dalam dunia bisnis, teori keagenan diartikan bahwa adanya hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Mengenai teori keagenan, Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa: *An agency relationship is one in which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.* Teori ini menjelaskan bahwa adanya hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana ada pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen). Dalam hal ini pihak prinsipal sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi. Selanjutnya, hasil dari pengolahan informasi tersebut dapat digunakan pihak prinsipal dalam pengambilan keputusan. Agen secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal, sedangkan di sisi lain manajemen juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.

Pada sektor publik hubungan keagenan ini tidak jauh beda dengan perusahaan pada umumnya, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah di Indonesia melibatkan dua pihak dalam penyusunan APBD yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, pihak eksekutif bertindak sebagai agen sedangkan pihak legislatif



bertindak sebagai prinsipal. APBD yang dirancang setiap tahun oleh eksekutif berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memberikan informasi kepada legislatif tentang program yang akan direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta pembiayaan dari program-program tersebut. Sedangkan, pihak legislatif akan memeriksa kembali dan akan dibahas bersama sebelum diputuskan menjadi Perda (Peraturan Daerah). Anggaran APBD yang telah disetujui atau disahkan oleh DPRD dan sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan kontrol oleh pihak legislatif dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

## **2.2 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan batasan tertentu dalam mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Otonomi daerah tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian

daerah dan pemerataan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, dengan adanya otonomi daerah sumber pendapatan daerah dapat ditingkatkan potensinya agar lebih efisien.

### **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dicantumkan dalam peraturan daerah (Perda). Dalam memberikan pelayanan publik, APBD merupakan dasar bagi pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya. APBD terdiri dari anggaran, pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan.

APBD yang dianggarkan setiap tahun menggunakan peraturan dan kebijakan yang dibuat dari masing-masing pemerintah daerah. Baiknya kinerja APBD di suatu daerah dapat ditinjau dari pengelolaan sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah serta kegiatan atau program kerja yang akan dikerjakan. Sehingga, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik dalam suatu daerah dapat menjadikan APBD sebagai salah satu instrumennya (Rizqiyati et al., 2019).

### **2.4 Belanja Modal**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengartikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran dalam memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang

yaitu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk memperoleh aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Aset tetap tersebut memiliki ciri-ciri/karakteristik yaitu berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai manfaat jangka panjang, dan nilainya relatif material. Sedangkan, untuk ciri-ciri aset lainnya adalah tak berwujud, aset kerja sama dengan pihak ketiga, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Penetapan kebijakan akuntansi dalam hal batasan minimum kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya diharapkan dapat dilakukan oleh setiap entitas dengan berpedoman pada ciri-ciri tersebut, sehingga hal tersebut dapat menjadi pedoman bagi para penyusun anggaran dalam menetapkan anggaran belanja modal maupun dalam hal pelaporan keuangan pemerintah (Waryanto, 2017).

Belanja modal termasuk ke dalam kategori belanja langsung. Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 belanja modal terbagi menjadi:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan belanja modal untuk menganggarkan tanah yang akan digunakan dalam aktivitas operasional pemerintah daerah serta dalam keadaan sudah siap untuk dipergunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja modal untuk menganggarkan peralatan dan mesin seperti mesin dan kendaraan bermotor, inventaris kantor, alat-alat elektronik, dan peralatan lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang serta dalam keadaan sudah siap untuk dipergunakan.

### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan belanja modal untuk menganggarkan semua gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam aktivitas operasional pemerintah daerah serta dalam keadaan sudah siap untuk dipergunakan.

### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan belanja modal untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun dan dimiliki oleh pemerintah daerah serta dalam keadaan sudah siap untuk dipergunakan.

### 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja modal untuk menganggarkan aset tetap lainnya seperti aset tetap yang tidak termasuk ke dalam kelompok aset tetap yang telah dijelaskan sebelumnya dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam aktivitas operasional pemerintah daerah serta dalam keadaan sudah siap untuk dipergunakan.

### 6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan dalam aktivitas operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi karakteristik aset tetap, serta harus dicantumkan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, aset tetap sebagaimana dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah semua biaya lainnya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai

aset tetap tersebut telah siap untuk digunakan. Komponen belanja tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebagai belanja modal bukan sebagai belanja operasional.

Belanja modal merupakan penunjang pembangunan sarana dan prasarana dalam suatu daerah. Contoh dari pembangunan tersebut seperti pembangunan infrastruktur yang mana nantinya akan menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Belanja modal yang akan dialokasikan didasarkan pada kebutuhan setiap daerah akan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah atau untuk fasilitas publik.

## **2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rizqiyati et al., 2019). Pemerintah daerah menganggap bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penambahan atas kekayaan bersih yang berasal dari penerimaan bersifat kas dan diperoleh dalam satu periode anggaran serta tidak memiliki kewajiban untuk dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan teori keagenan, masyarakat sebagai prinsipal memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Prasetya, 2021).

Upaya dalam memperkecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD dapat digunakan sebagai sumber pendanaan daerah yang dapat dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan pembangunan dan melaksanakan pemerintahannya. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh. Semakin tinggi PAD yang diperoleh pada APBD maka akan semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah tersebut. PAD dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, dikarenakan PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu pemerintah daerah. Namun, yang kerap terjadi di pemerintah daerah Indonesia yaitu kurangnya keterlibatan PAD dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat lebih mendominasi dalam susunan APBD (Ferdiansyah et al., 2018).

## **2.6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Pada akhir tahun biasanya selalu terjadi sisa anggaran pada pemerintah daerah, sisa anggaran ini disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 pasal 1 merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran selama satu periode. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai aktivitas yang belum terealisasikan pada tahun anggaran sebelumnya maupun aktivitas baru yang belum masuk dalam anggaran APBD murni sebelumnya, sehingga SiLPA menjadi salah satu penerimaan internal pemerintah daerah (Rizqiyati et al., 2019).

(Maulana & Liza, 2018) menyebutkan bahwa SiLPA tahun anggaran sebelumnya terdiri dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan pembiayaan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan, kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terealisasi.

## **2.7 Luas Wilayah**

Wilayah merupakan suatu daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Luas wilayah adalah ukuran besar kecilnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintah kabupaten/kota, atau bahkan provinsi, terkadang luas wilayah terkait dengan geografis suatu daerah tersebut. Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak pulau yang tersebar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2004, luas wilayah menjadi suatu kebutuhan dalam penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Luasnya wilayah suatu daerah akan sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wilayah yang lebih luas akan lebih banyak membutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada publik, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut akan berdampak pada besarnya APBD di masing-masing daerah yang akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah khususnya yang berkaitan pada anggaran belanja modal (Rizqiyati et al., 2019).

## 2.8 Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga yang biasanya dipilih dan bersifat sebagai penasehat. Proses penyusunan anggaran berbeda-beda setiap negara, tetapi Lembaga legislatif memiliki peran aktif di negara berkembang. Dalam proses anggaran, keterlibatan legislatif sangat dibutuhkan agar terciptanya pemerintahan dengan tata kelola yang baik dan terwujudnya anggaran yang transparan (Junita & Abdullah, 2016). Lembaga legislatif bertugas dalam membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang dari negara atau daerah, selain itu memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga legislatif juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan atas anggaran, pada proses penganggaran semua yang dibuat oleh eksekutif nantinya akan bergantung pada keputusan legislatif dikarenakan lembaga legislatif memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak rancangan anggaran yang diusulkan oleh eksekutif dengan berbagai macam pertimbangan. Semakin banyak jumlah pembuat keputusan anggaran, maka akan semakin besar pula besaran pemerintahnya.

Pihak legislatif diberi kekuasaan untuk menjadi perwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan dana publik dalam anggaran pemerintah. Hal ini karena pihak legislatif yang menyetujui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) dengan cara menerima rancangan atas anggaran yang telah diajukan oleh pihak eksekutif. Pihak legislatif yakni anggota DPRD akan memaksimalkan kekuasaan yang dimilikinya agar dapat memengaruhi pengalokasian sumber daya dalam APBD, sehingga hal tersebut sebanding dengan kepentingan pribadinya untuk menepati janji di kampanye dan berharap dapat



dipilih kembali di pemilu berikutnya. Maka dari itu, semakin banyak jumlah anggota lembaga legislatif dalam suatu daerah, maka akan semakin besar pula masalah keagenan yang dihadapi dalam penganggaran daerah.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi literatur dalam penelitian ini yang masih berkaitan dengan topik yang akan digunakan. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Fandi Prasetya (2021)	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK)	Analisis regresi linear berganda	PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan, DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

2.	N. Rohmah, I. Riharjo (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>- Dana Alokasi Umum (DAU)</li> <li>- Dana Alokasi Khusus (DAK)</li> <li>- Luas Wilayah</li> </ul>	Analisis regresi linear berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena apabila PAD yang diperoleh tinggi maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal, agar DAU dapat terkontrol dengan baik maka pemerintah harus melihat potensi dari daerahnya.
----	---------------------------------	--	----------------------------------	---

				<p>Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena tingginya DAK akan memiliki kecenderungan tingkat belanja modal yang besar. Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.</p>
3.	Rully Farel (2015)	<p>- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</p> <p>- Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda dengan <i>Ordinary Least Square (OLS)</i></p>	<p>Secara parsial PDRB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di kabupaten Bogor periode 2003-2013. PAD</p>

		- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di kabupaten Bogor periode 2003-2013. serta SiLPA juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal daerah di kabupaten Bogor periode 2003-2013.
4.	V. Vanesha, S. Rahmadi, P. Parmadi (2019)	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)	Regresi Data Panel	PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Meskipun demikian, secara

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Alokasi Khusus (DAK)</li> </ul>		<p>parsial DAU yang hanya berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara untuk PAD dan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.</p>
5.	<p>Maria Maria, D. Indriasari, N. Nurhasanah (2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>- Dana Perimbangan</li> <li>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</li> <li>- Rasio Ruang Fiskal</li> </ul>	<p><i>multiple regression</i></p>	<p>Secara Bersama-sama PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, dan Rasio Ruang Fiskal berkontribusi terhadap belanja modal sebesar 69,8%. Secara parsial, PAD tidak memengaruhi alokasi belanja modal dan dana</p>

				<p>perimbangan merupakan faktor paling dominan sebesar 28,94% terhadap alokasi belanja modal.</p>
6.	<p>A. Junita, S. Abdullah (2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekanan Fiskal (<i>Fiscal Stress</i>)</li> <li>- Besaran Legislatif (<i>Legislature Size</i>)</li> </ul>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa <i>fiscal stress</i> berpengaruh negatif terhadap perubahan belanja, sedangkan <i>legislature size</i> berpengaruh positif terhadap perubahan belanja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merespon besaran penerimaan, perubahan</p>

				<p>anggaran sangat penting serta banyaknya anggota dewan mencerminkan kepentingan yang harus didukung dalam penyesuaian anggaran belanja daerah.</p>
--	--	--	--	--

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, dan Ukuran Legislatif terhadap Anggaran Belanja Modal. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan dan masih harus diuji kebenarannya secara empiris. Maka dari itu, berikut merupakan beberapa hipotesis yang didapat untuk penelitian ini:

### 2.10.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD berasal

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam suatu daerah yang menjadi salah satu sumber dalam mendanai anggaran belanja modal adalah PAD. Semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi pula anggaran belanja modal daerah tersebut yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan daerahnya.

Dalam hubungan keagenan, pemerintah daerah selaku agen harus memberikan timbal balik dan tanggung jawab dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menciptakan kualitas pelayanan publik yang memadai. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagainya yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prasetya, 2021), (Vanesha et al., 2019), dan (Maria Maria et al., 2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah & Riharjo, 2019), (Farel, 2015), dan (Angelina et al., 2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.



## **2.10.2 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran pada anggaran tahun lalu. SiLPA menjadi penerimaan pada awal tahun selanjutnya dan dapat dipergunakan untuk sumber pendanaan kegiatan atau belanja tahun selanjutnya. Apabila semakin tinggi SiLPA maka akan semakin tinggi pula anggaran belanja modal daerah tersebut. SiLPA hanya akan terbentuk apabila APBD mengalami surplus dan terjadi pembiayaan neto yang positif, di mana penerimaan daerah lebih besar daripada pembiayaannya. Besarnya SiLPA harus dilaporkan agar dapat menjadi evaluasi tahun anggaran berikutnya sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selaku agen ke masyarakat selaku prinsipal.

Sebagian besar SiLPA dialokasikan ke belanja langsung yaitu belanja modal yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja modal tersebut berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Farel, 2015), (Saraswati, 2021), dan (Maria Maria et al., 2021) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.

### **2.10.3 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Anggaran Belanja Modal**

Luas wilayah menunjukkan kebutuhan dari suatu daerah atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Wilayah yang memiliki ukuran lebih luas tentu akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak dan memadai agar terciptanya pemerataan pelayanan publik serta mengurangi perbedaan yang signifikan antar daerah. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana harus diimbangi dengan adanya dana yang akan digunakan untuk belanja modal sesuai dengan kebutuhan daerah.

Wilayah yang lebih luas akan memiliki tekanan dari publik sebagai prinsipal lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang lebih kecil. Oleh karena itu, lingkup kewenangannya lebih besar dan pelayanan publik lebih rumit pada wilayah yang lebih luas. Selain itu, program dan kegiatan yang diselenggarakan akan lebih banyak, sehingga membutuhkan anggaran belanja yang besar. Maka dari itu pemerintah sebagai agen diberi kepercayaan oleh masyarakat agar dapat melaksanakan program yang memberi manfaat bagi masyarakat yang direfleksikan dalam anggaran.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Rohmah & Riharjo, 2019) menyatakan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.

#### **2.10.4 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Anggaran Belanja Modal**

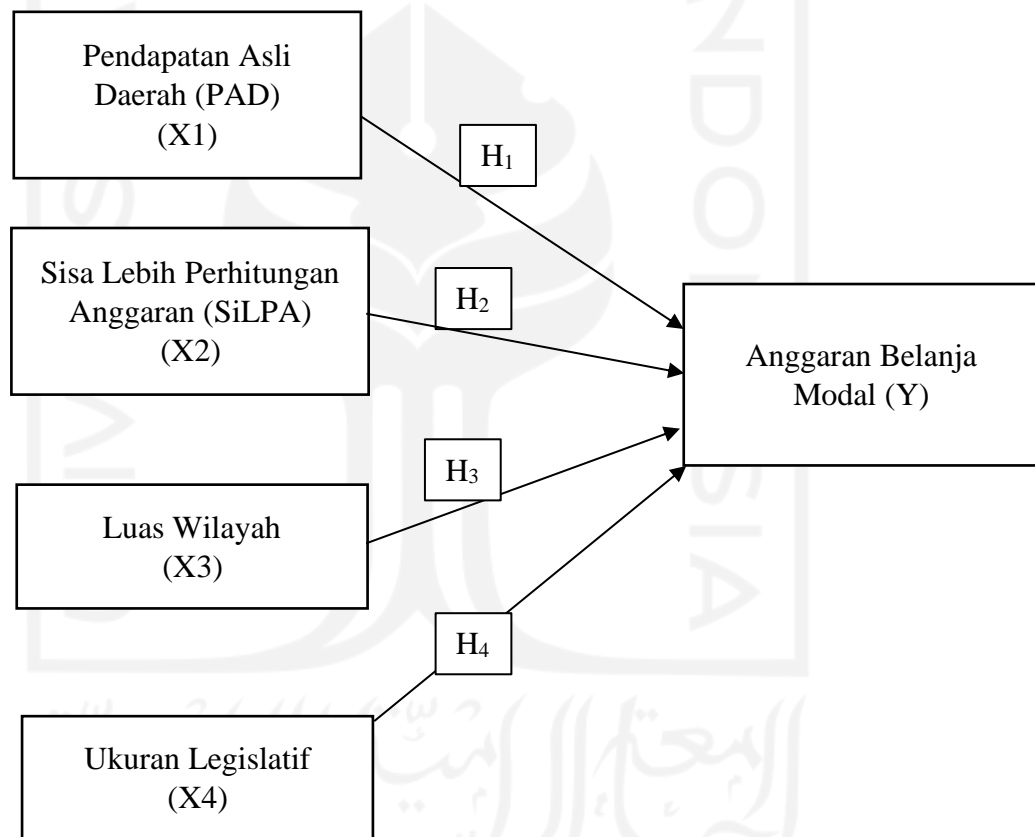
Ukuran legislatif yang besar akan berhubungan positif dengan besaran belanja. Dalam hubungan keagenan, pihak legislatif yaitu anggota DPRD sebagai agen akan memaksimalkan kekuasaan yang dimilikinya dalam memengaruhi pengalokasian APBD, hal ini juga menjadi kepentingan pribadinya dalam menepati janji pada saat kampanye serta berharap dapat dipilih kembali di pemilu selanjutnya. Semakin banyak jumlah dari anggota DPRD, maka akan semakin besar pula masalah keagenan yang dihadapi dalam penganggaran di daerah tersebut. Adanya perbedaan rencana pelaksanaan program dan kegiatan antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam penyusunan alokasi anggaran serta kinerja yang diharapkan dari program dan kegiatan tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Junita & Abdullah, 2016) menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan anggaran belanja pada pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.

## 2.11 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan melihat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, dan Ukuran Legislatif terhadap Anggaran Belanja Modal. Bentuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada periode 2017 - 2019. Sedangkan, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan sampel adalah Kabupaten/Kota Se-Sumatera yang mengunggah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2017 hingga 2019 yang dapat diakses oleh peneliti, Kabupaten/Kota Se-Sumatera yang melaporkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, luas wilayah, jumlah anggota DPRD, serta anggaran belanja modal pada tahun 2017 - 2019. Data tersebut diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera.

#### **3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Penelitian ini menggunakan variabel yang akan dianalisis yaitu satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Belanja Modal. Variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, Ukuran Legislatif. Gambaran mengenai variabel yang digunakan serta pengukuran terhadap variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam definisi operasional dan pengukuran variabel.

### **3.2.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel kunci dalam sebuah penelitian. Suatu penelitian akan dapat memprediksi ataupun menjelaskan variabel atas perubahan yang akan terjadi di kemudian. Variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Anggaran Belanja Modal yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera tahun 2017-2019. Indikator yang digunakan dalam mengukur belanja modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan Gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya.

### **3.2.2 Variabel Independen**

Variabel independen merupakan variabel yang dapat memengaruhi variabel dependen dan memiliki hubungan negatif maupun positif terhadap variabel dependen nantinya. Hasil yang beragam atas variabel dependen merupakan variasi dari hasil variabel independen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, dan Ukuran Legislatif. Variabel Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diukur dengan melihat besarnya realisasi dari PAD dan SiLPA masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada tahun 2017 - 2019. Luas wilayah diukur dengan melihat besarnya luas dari masing-masing Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Ukuran legislatif diukur dengan melihat jumlah dari anggota DPRD masing-masing Kabupaten/Kota Se-Sumatera.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data yang sudah ada secara tidak langsung. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2017 hingga 2019, Luas Wilayah, dan jumlah anggota Legislatif yang diperoleh melalui website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Sehingga, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yang dapat mendukung penelitian.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh. Metode kuantitatif menggambarkan fenomena yang saat ini berlangsung dan saat lampau. Data dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dan diuji dengan uji statistik sebagai berikut:

### 3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan untuk menggambarkan informasi yang didapat dari suatu data.

### 3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh dari dua atau lebih variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara variabel tersebut. Software yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah SPSS (*Statistical Package Social Science*). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ABM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 SiLPA + \beta_3 LW + \beta_4 UL + \varepsilon$$

Keterangan:

ABM : Anggaran Belanja Modal

$\alpha$  : Konstanta

PAD : Pendapatan Asli Daerah

SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

LW : Luas Wilayah

UL : Ukuran Legislatif

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien Regresi

$\varepsilon$  : *Error term*



### 3.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ditujukan untuk melihat seberapa besar kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi ini dilihat dari nilai *Adj. R<sup>2</sup>* nol sampai satu. Apabila nilai *Adj. R<sup>2</sup>* menunjukkan angka mendekati 1, maka variabel-variabel independen yang digunakan memberikan informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan variabel dependennya.

### 3.4.4 Uji t

Uji t ditujukan untuk melihat pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Uji t dilakukan dengan cara melihat t hitung dan t tabel, serta dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05 atau 5%. Apabila t hitung > t tabel atau Sig. < 0,05 maka variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya apabila t hitung < t tabel atau Sig. > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada uji t ini, menentukan nilai t tabel yaitu dengan melihat tabel distribusi t dan nilai t hitung yang dicari dengan cara menghitung menggunakan SPSS.

### 3.4.5 Uji Asumsi Klasik

Syarat statistik yang harus dipenuhi apabila melakukan analisis regresi linear berganda yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan guna melihat data yang dihasilkan terdistribusi normal dan tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

#### **3.4.5.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah analisis regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikansi  $> 0,05$ .

#### **3.4.5.2 Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas ditujukan untuk melihat apakah pada analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, tingkat signifikan untuk menolak hipotesis nol semakin besar dan probabilitas menerima hipotesis yang salah juga akan semakin besar. Dalam model ini suatu model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas apabila mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10.

#### **3.4.5.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah di dalam analisis regresi terdapat ketidaksamaan atau ketidakkonsistenan dalam varians variabel dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adalah ketidakefisienan estimator yang diperoleh, baik itu dalam sampel kecil maupun besar. Uji ini dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual nya (SRESID).

Dasar uji heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Scatterplot yaitu apabila adanya pola tertentu, seperti titik teratur yang membentuk pola tertentu, maka akan mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Sedangkan, apabila polanya tidak jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Rohmah & Riharjo, 2019).



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah pengumpulan data sudah dilakukan, yaitu data berupa laporan realisasi PAD, SiLPA, Luas Wilayah, Jumlah Anggota DPRD, dan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Data yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Jumlah Data**

Jumlah Kab/Kota Se-Sumatera	154
Jumlah Kab/Kota yang tidak memenuhi kriteria	(65)
<b>Jumlah Kab/Kota yang memenuhi kriteria</b>	<b>89</b>
<b>Rentang waktu pengamatan (tahun)</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah sampel total penelitian</b>	<b>267</b>

Jumlah Kabupaten/Kota Se-Sumatera adalah 154 Kabupaten/Kota, dengan rentang waktu selama 3 tahun (2017-2019) data yang didapat yaitu 267 dengan rincian 89 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data yang akan dilakukan tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah, silpa, luas wilayah, dan ukuran legislatif terhadap anggaran belanja modal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan data-data variabel penelitian yang terdiri dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Sedangkan, analisis statistik yaitu analisis berdasarkan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis pada penelitian. Pada penelitian ini analisis statistic yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

#### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis statistik deskriptif terhadap variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Statistik Deskriptif</b>					
	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
PAD	267	18411	1084640	109169.31	101522.865
SiLPA	267	-7658	310713	72350.70	56876.233
Luas Wilayah	267	23.00	18359.04	2552.6916	2369.26850
Ukuran Legislatif	267	4	50	31.08	11.408
Anggaran Belanja Modal	267	88587	747220	277571.66	108164.506

Sumber: Data Sekunder, diolah

Hasil analisis statistik deskriptif di atas, jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel adalah 89 kabupaten/kota Se-Sumatera, dengan 267 data yang diperoleh pada tahun 2017-2019. Nilai rata-rata anggaran belanja modal sebesar 2777571,66 dan standar deviasinya sebesar 108164,506. Nilai maksimum anggaran belanja

modal sebesar 747220 adalah Kabupaten Simalungun tahun 2018 dan nilai minimum anggaran belanja modal sebesar 88587 adalah Kota Sibolga tahun 2019.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 109169,31 dan standar deviasi sebesar 101522,865. Nilai maksimum PAD sebesar 1084640 adalah Kota Batam tahun 2018 dan nilai minimum PAD sebesar 18411 adalah Kabupaten Nias Barat tahun 2019.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 72350,70 dan standar deviasi sebesar 56876,233. Nilai maksimum SiLPA sebesar 310713 adalah Kabupaten OKI tahun 2018 dan nilai minimum SiLPA sebesar -7658 adalah Kabupaten Way Kanan tahun 2019.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Luas Wilayah sebesar 2552,6916 dan standar deviasi sebesar 2369,26850. Nilai maksimum Luas Wilayah sebesar 18359,04 adalah Kabupaten OKI dan nilai minimum sebesar 23 adalah Kota Padang Panjang.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata ukuran legislatif sebesar 31,08 dan standar deviasi sebesar 11,408. Nilai maksimum ukuran legislatif adalah 50 dan nilai minimum adalah 4.

#### **4.2 Analisis Statistik**

Hasil model analisis statistik ini telah melewati uji asumsi klasik standar yang umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastis.

#### 4.2.1 Uji Normalitas

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Normalitas**

			Unstandardized Residual
N			267
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		78136.48266
Most Extreme Differences	Absolute		.074
	Positive		.074
	Negative		-.043
Test Statistic			.074
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.093 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.086
		Upper Bound	.100

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000

Berdasarkan tabel 4.3 hasil Uji Normalitas di atas, menunjukkan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,093 yang artinya hasil uji normalitas tersebut memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual data yang akan diolah tersebut terdistribusi normal dan memenuhi

prasyarat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Selanjutnya data tersebut dilanjutkan dalam proses pengolahan data.

#### 4.2.2 Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.888	1.126
	SiLPA	.928	1.077
	Luas Wilayah	.838	1.193
	Ukuran Legislatif	.801	1.248

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal

Dari hasil Uji Multikolinearitas di atas, nilai *Tolerance* untuk semua variabel independen yaitu bernilai  $> 0,1$  dan nilai VIF untuk semua variabel independen tersebut bernilai  $< 10$ , yang artinya tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa PAD memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,888  $> 0,1$  dan nilai VIF 1,126  $< 10$ . Dari hasil tersebut artinya PAD telah memenuhi prasyarat uji multikolinearitas.

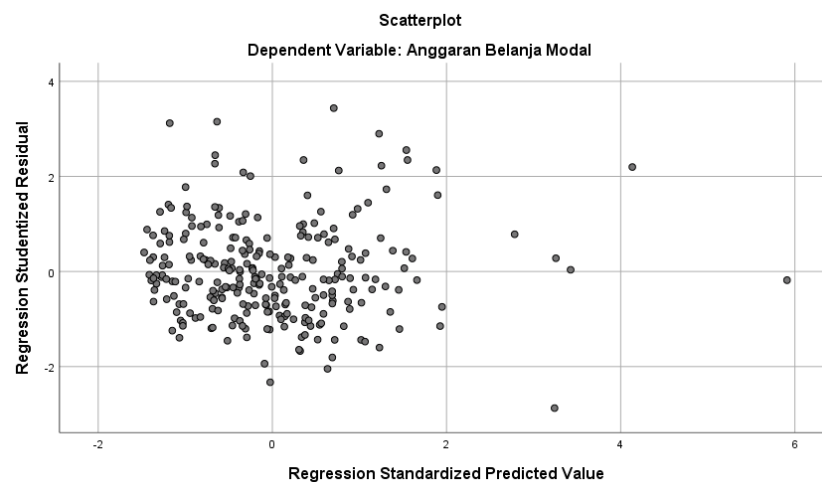
SiLPA memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,928  $> 0,1$  dan nilai VIF 1,077  $< 10$ . Dari hasil tersebut artinya SiLPA telah memenuhi prasyarat uji multikolinearitas.



Luas Wilayah memiliki nilai *Tolerance* sebesar  $0,838 > 0,1$  dan nilai VIF  $1,193 < 10$ . Dari hasil tersebut artinya Luas Wilayah telah memenuhi prasyarat uji multikolinearitas.

Ukuran Legislatif memiliki nilai *Tolerance* sebesar  $0,801 > 0,1$  dan nilai VIF  $1,248 < 10$ . Dari hasil tersebut artinya Ukuran Legislatif telah memenuhi prasyarat uji multikolinearitas.

#### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4.1**

#### **Scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar Scatterplot di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

#### 4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Luas Wilayah, dan Ukuran Legislatif terhadap Anggaran Belanja Modal digunakan analisis Regresi Linear Berganda.

Pada penelitian ini digunakan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$ABM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 SiLPA + \beta_3 LW + \beta_4 UL + \varepsilon$$

Keterangan:

ABM : Anggaran Belanja Modal

$\alpha$  : Konstanta

PAD : Pendapatan Asli Daerah

SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

LW : Luas Wilayah

UL : Ukuran Legislatif

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien Regresi

$\varepsilon$  : *Error term*

**Tabel 4.5**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized B
1	(Constan)	95680.755
	PAD	.395
	SiLPA	-.021
	Luas Wilayah	9.174
	Ukuran Legislatif	3762.294

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.5 tersebut, model persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$ABM = 95.680,755 + 0,395PAD - 0,021SiLPA + 9,174LW + 3.762,294UL + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 95.680,755 menunjukkan bahwa jika PAD, SiLPA, Luas Wilayah, dan Ukuran Legislatif bernilai 0, maka diperkirakan besarnya anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera sebesar 95680,755.

Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah adalah positif sebesar 0,395 yang artinya apabila nilai PAD ditingkatkan 1 persen, maka anggaran belanja modal akan meningkat sebesar 0,395.

Koefisien regresi untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah negatif sebesar - 0,021 yang artinya apabila nilai SiLPA ditingkatkan 1 persen, maka akan menurunkan anggaran belanja modal sebesar 0,021.

Koefisien regresi untuk Luas Wilayah adalah positif sebesar 9,174 yang artinya apabila nilai Luas Wilayah ditingkatkan 1 persen, maka anggaran belanja modal akan meningkat sebesar 9,174.

Koefisien regresi untuk Ukuran Legislatif adalah positif sebesar 3.762,294 yang artinya apabila nilai Ukuran Legislatif ditingkatkan 1 persen, maka anggaran belanja modal akan meningkat sebesar 3.762,294.

#### 4.3.1 Koefisien Determinasi

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 <sup>a</sup>	.478	.470	78730.685

a. Predictors: (Constant), Ukuran Legislatif, SiLPA, Luas Wilayah, PAD

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan pada Tabel 4.6, nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,470 atau 47%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dari variabel dependen sebesar 47% mampu dijelaskan oleh semua variabel independen dalam penelitian ini. Dan sisanya yaitu sebesar 53% dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar penelitian ini.

### 4.3.2 Uji t

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji t**

	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	95680.755	15204.290		6.293	.000
PAD	.395	.050	.370	7.820	.000
SiLPA	-.021	.088	-.011	-.240	.811
Luas Wilayah	9.174	2.226	.201	4.122	.000
Ukuran Legislatif	3762.294	472.757	.397	7.958	.000

Pada tabel hasil uji t di atas, variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung senilai 7,820 dimana lebih besar dari t tabel yaitu 1,969 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang artinya variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, dengan demikian Hipotesis pertama penelitian ini diterima.

Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memiliki t hitung senilai - 0,240 dimana lebih kecil dari t tabel yaitu 1,969 dengan signifikansi  $0,811 > 0,05$  yang artinya variabel SiLPA tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, dengan demikian Hipotesis kedua penelitian ini ditolak.

Variabel Luas Wilayah memiliki t hitung senilai 4,122 dimana lebih besar dari t tabel yaitu 1,969 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang artinya variabel Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, dengan demikian Hipotesis ketiga penelitian ini diterima.

Variabel Ukuran Legislatif memiliki t hitung senilai 7,958 dimana lebih besar dari t tabel yaitu 1,969 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang artinya variabel Ukuran Legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, dengan demikian Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Pengaruh PAD Terhadap Anggaran Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis pertama, membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Sehingga, semakin tinggi PAD akan mengakibatkan anggaran belanja modal juga semakin tinggi. Dalam hal ini berarti, pemerintah daerah selaku agen telah memberikan timbal balik dan tanggung jawab dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menciptakan kualitas pelayanan publik yang memadai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Begitu pula masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagainya yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali suatu daerah itu sesuai dengan sumber kekayaan daerah yang dimilikinya. Bagi pemerintah daerah PAD sangat penting, berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, karena apabila penerimaan PAD suatu daerah itu besar maka akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang baik dan kemudian akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Prasetya, 2021), (Vanesha et al., 2019), dan (Maria Maria et al., 2021) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah & Riharjo, 2019), (Farel, 2015), dan (Angelina et al., 2020) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal.

#### **4.4.2 Pengaruh SiLPA Terhadap Anggaran Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis kedua, membuktikan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Sumatera. Hal ini berarti semakin tinggi SiLPA tidak memengaruhi anggaran belanja modal. SiLPA yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran yang berasal dari selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran sebelumnya tidak dimasukkan sebagai pendanaan dalam kegiatan dan belanja modal, hal itu dikarenakan SiLPA yang biasanya

digunakan untuk menutup defisit APBD dan atau untuk pengeluaran pembiayaan dana cadangan ataupun investasi pada tahun berjalan. Selain itu sebelum pelaksanaan periode sebelumnya selesai, penetapan SiLPA untuk periode berjalan sudah dilakukan, sehingga masih adanya ketidakpastian besaran SiLPA yang dianggarkan untuk periode berjalan.

Menurut (Rizqiyati et al., 2019) angka SiLPA yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah sebagai agen dalam pelaksanaan anggaran masih rendah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Farel, 2015), (Saraswati, 2021), dan (Maria Maria et al., 2021) yang menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal.

#### **4.4.3 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Anggaran Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis ketiga, membuktikan bahwa luas wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Hal ini dapat diartikan bahwa besar atau kecilnya luas wilayah dapat memengaruhi anggaran belanja modal. Sehingga, wilayah yang lebih luas akan lebih membutuhkan anggaran belanja modal yang lebih tinggi. Wilayah yang lebih luas akan memiliki tekanan lebih besar dari publik sebagai prinsipal kepada pemerintah untuk menunjang pembangunan infrastruktur daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memadai dibandingkan dengan wilayah yang lebih kecil.



Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Rohmah & Riharjo, 2019) yang mengatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal.

#### **4.4.4 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Anggaran Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis keempat, membuktikan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya ukuran legislatif berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Anggota legislatif memiliki peran dalam pengambilan keputusan terhadap penyusunan anggaran belanja modal. Dalam hal ini, anggota DPRD sebagai agen telah memaksimalkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memengaruhi pengalokasian APBD. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Junita & Abdullah, 2016) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Luas Wilayah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* Versi 26. Data sampel yang memenuhi kriteria pengambilan sampel sebanyak 267 data Kabupaten/Kota Se-Sumatera selama periode 2017-2019.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada periode 2017-2019. Hal ini berarti apabila semakin tinggi PAD suatu daerah akan menyebabkan anggaran belanja modal juga semakin tinggi. Maka dari itu, PAD dapat menjadi sumber pendanaan dalam membiayai belanja modal.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada periode 2017-2019. Hal ini berarti semakin tinggi SiLPA tidak memengaruhi besarnya anggaran belanja modal. SiLPA yang merupakan sisa lebih perhitungan

anggaran tidak dimasukkan sebagai pendanaan dalam kegiatan dan belanja modal.

3. Luas Wilayah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada periode 2017-2019. Hal ini berarti besar kecilnya luas wilayah dapat memengaruhi anggaran belanja modal. Wilayah yang luas tentu akan lebih membutuhkan anggaran belanja modal yang lebih tinggi.
4. Ukuran Legislatif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera pada periode 2017-2019. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran legislatif memengaruhi anggaran belanja modal.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah diperoleh serta informasi yang mendukung, maka peneliti hendak memberikan saran terkait dengan permasalahan yang muncul dari hasil penelitian. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera besaran anggaran belanja modal hendaknya dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan besar kecilnya luas suatu daerah tersebut dan besarnya PAD, SiLPA, maupun banyaknya anggota legislatif. Pemerintah daerah pun selanjutnya bisa menerapkan atau meningkatkan sistem *good governance* di daerahnya, sehingga penyusunan anggaran belanja modal dapat dikontrol dengan baik dan terhindar dari

penyimpangan seperti korupsi dan manipulasi anggaran, sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan data yang lebih lengkap dan menambah variabel yang bervariasi selain PAD, SiLPA, Luas Wilayah, dan Ukuran Legislatif yang memang nantinya dapat berpengaruh terhadap besaran anggaran belanja modal, misalnya menambahkan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & Jesisca, J. (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Owner*, 4(1), 138–147.
- Farel, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 189–210.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1), 44–52.
- Junita, A., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Fiscal Stress Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 477–478.
- Maria Maria, Indriasari, D., & Nurhasanah, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 97–104.
- Maulana, I., & Liza, F. (2018). Pengaruh Perubahan Sisa Lebih Anggaran Dan Perubahan Dana Bagi Hasil Terhadap Perubahan Belanja Modal (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2015) *Impact Of The Unspent Fund (Silpa) And Changes In Profit Sharing Fund* (DB. *Jurnal JESKaPe*, 2(2), 173–182.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi  
Pemerintahan.

Prasetya, F. (2021). Penerimaan Daerah Sebagai Aspek Penting Penentu Belanja  
Modal Pemerintah: Studi Pada Pemerintah Banyuwangi. *Jurnal Kajian  
Akuntansi*, 5(1), 69–85.

Rizqiyati, C., Perdana, H. D., & Setiawan, D. (2019). Determinan Perubahan  
Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 83–  
96.

Rohmah, N., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  
Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada  
Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017). *Jurnal Ilmu  
Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1–17.

Saraswati, D. (2021). Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dan  
Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten  
Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia*, 2(1), 178–  
186.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36.

Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Data Anggaran Belanja Modal (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Modal		
	2017	2018	2019
Asahan	370727	241120	347395
Batu Bara	199678	160463	263327
Dairi	314796	216933	217615
Humbang Hasundutan	258654	168058	212002
Karo	367511	261103	215508
Labuhan Batu	329521	317119	372241
Labuhanbatu Selatan	283550	240180	234003
Labuhanbatu Utara	264364	93507	277108
Langkat	576305	424561	387964
Mandailing Natal	281288	218698	248924
Nias	280085	244389	212173
Nias Barat	237710	295384	227341
Nias Selatan	222328	252287	286446
Nias Utara	283439	239342	234129
Padang Lawas	266338	225202	251864
Padang Lawas Utara	328324	206917	262716
Pakpak Bharat	152618	200214	177526



Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Modal		
	2017	2018	2019
Samosir	250593	180588	179775
Serdang Bedagai	251776	387786	342239
Simalungun	365349	747220	419152
Tapanuli Selatan	294845	372224	439876
Tapanuli Tengah	179510	303931	223115
Tapanuli Utara	164320	194248	200896
Toba Samosir	237182	168081	146730
Binjai	207278	253914	162305
Gunung Sitoli	265810	342107	311472
Padang Sidimpuan	198641	124932	154220
Pematang Siantar	330963	242298	268534
Sibolga	134891	176542	88587
Tanjungbalai	140705	265955	240914
Tebing Tinggi	191501	204916	166511
Agam	282286	234293	296387
Dharmasraya	307129	227958	246852

Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Modal		
	2017	2018	2019
Kepulauan Mentawai	414349	299226	332276
Lima Puluh Kota	249953	256879	290294
Padang Pariaman	393241	302223	283121
Pasaman	230139	169988	171348
Pasaman Barat	292868	383586	308436
Pesisir Selatan	355908	353120	425398
Sijunjung	251821	243931	263734
Solok	221656	196850	220344
Solok Selatan	249660	217614	301666
Tanah Datar	229576	210885	237507
Bukittinggi	192584	240718	304079
Padang	488170	494737	544748
Padang Panjang	300615	147520	111041
Pariaman	173056	176974	171955
Payakumbuh	190228	164577	212430
Sawahlunto	143830	94332	128379
Solok	208045	174001	141146
Banyuasin	334174	285489	503187
Empat Lawang	208910	264934	288896
Lahat	472540	329083	436702

Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Modal		
	2017	2018	2019
Muara Enim	544509	580870	975726
Musi Rawas	333811	380130	453086
Musi Rawas Utara	299934	348926	415190
Ogan Ilir	433337	314325	360846
OKI	540672	319169	662165
OKU	353335	384309	373806
OKU Selatan	318163	331198	417444
OKU Timur	311590	289839	500645
Penukal Abab Lematang Ilir	420359	888066	846917
Lubuklinggau	303695	282564	335570
Pagar Alam	299041	181937	238549
Prabumulih	212007	131649	334039
Lampung Barat	353981	295730	228021
Lampung Selatan	594349	542647	584369
Lampung Tengah	510752	415182	396133
Lampung Timur	350062	312590	292951
Lampung Utara	599292	400953	187486
Mesuji	187120	294141	250962
Pesawaran	381997	364956	252421
Pesisir Barat	336825	242368	194907

Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Modal		
	2017	2018	2019
Pringseweu	303566	235599	206220
Tanggamus	271428	204470	282704
Tulang Bawang	283731	276418	228164
Tulang Bawang Barat (Tubaba)	405985	476970	324254
Way Kanan	376096	487788	329480
Bandar Lampung	738666	527846	536362
Metro	248110	242359	226920
Bangka	242062	134546	198116
Bangka Barat	158101	158867	190863
Bangka Selatan	192829	238311	234044
Bangka Tengah	146098	198516	166531
Belitung	226238	230746	253464
Belitung Timur	126329	198736	164389
Pangkal Pinang	297225	250651	278424
Bintan	217716	221894	333522
Karimun	245886	303261	243091
Kepulauan Anambas	175436	248156	433929
Lingga	117982	116176	193505
Natuna	290236	138144	296837
Batam	671325	708280	803090

Tanjungpinang	178454	119059	203288
---------------	--------	--------	--------



## Lampiran 2

### Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	PAD		
	2017	2018	2019
Asahan	123687	142972	149647
Batu Bara	66944	64385	129221
Dairi	128489	73906	74360
Humbang Hasundutan	85598	92735	73757
Karo	157866	159189	117683
Labuhan Batu	124674	162794	175335
Labuhanbatu Selatan	84964	52209	75687
Labuhanbatu Utara	52690	57010	70122
Langkat	139717	136680	167523
Mandailing Natal	80581	84809	98758
Nias	95726	88754	107639
Nias Barat	36239	40193	18411
Nias Selatan	18450	19605	25664
Nias Utara	20107	50395	57961
Padang Lawas	46509	47455	52067
Padang Lawas Utara	74524	74306	42929
Pakpak Bharat	29320	20061	33915
Samosir	72228	47446	49860

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PAD</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Serdang Bedagai	103711	194382	143144
Simalungun	252663	665815	191940
Tapanuli Selatan	104722	140044	167458
Tapanuli Tengah	72710	76660	88441
Tapanuli Utara	162441	105656	113990
Toba Samosir	54840	52298	68046
Binjai	139217	135870	108954
Gunung Sitoli	29769	29456	32209
Padang Sidempuan	109640	75063	87432
Pematang Siantar	105445	137052	125018
Sibolga	103672	81245	69312
Tanjungbalai	65108	70766	63721
Tebing Tinggi	113222	114048	105239
Agam	161539	99684	123658
Dharmasraya	98937	84116	78882

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PAD</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kepulauan Mentawai	67862	45358	40203
Lima Puluh Kota	119771	73440	66168
Padang Pariaman	141310	84502	101607
Pasaman	142748	100067	98595
Pasaman Barat	158920	104523	104071
Pesisir Selatan	178145	123906	134804
Sijunjung	107915	79055	83906
Solok	113269	68301	74595
Solok Selatan	75505	60545	67842
Tanah Datar	172812	115914	129785
Bukittinggi	102375	101936	111896
Padang	548653	487937	546108
Padang Panjang	88837	79752	77323
Pariaman	30881	32213	36665
Payakumbuh	116596	94287	104070
Sawahlunto	62459	47227	57170
Solok	41852	40742	41651
Banyuasin	125984	140602	200616
Empat Lawang	68806	32217	41672
Lahat	164495	112571	141161



Kabupaten/Kota	PAD		
	2017	2018	2019
Muara Enim	226929	232468	303296
Musi Rawas	151594	106289	128563
Musi Rawas Utara	57580	30141	37574
Ogan Ilir	95711	55362	86150
OKI	222961	235946	195401
OKU	172013	156622	145563
OKU Selatan	89506	42993	57669
OKU Timur	77706	85235	99017
Penukal Abab Lematang Ilir	56934	74392	84794
Lubuklinggau	115521	105606	100950
Pagar Alam	65538	73600	60064
Prabumulih	119192	90910	100975
Lampung Barat	46789	50471	65217
Lampung Selatan	206061	215411	275464
Lampung Tengah	147048	165414	193634
Lampung Timur	111886	125035	147527
Lampung Utara	103970	102289	102587
Mesuji	22114	33206	45620
Pesawaran	50154	58265	65693
Pesisir Barat	43304	23481	29323

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PAD</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pringsewu	73405	71824	86313
Tanggamus	56177	61714	76050
Tulang Bawang	40931	67129	82379
Tulang Bawang Barat (Tubaba)	23142	27613	32410
Way Kanan	49551	56764	62353
Bandar Lampung	612809	550275	627296
Metro	138839	132202	176199
Bangka	196070	173056	144668
Bangka Barat	78486	69765	67746
Bangka Selatan	84707	49427	62941
Bangka Tengah	97375	75995	88848
Belitung	193196	191038	177674
Belitung Timur	109657	109456	111247
Pangkal Pinang	173947	167131	155116
Bintan	257000	286602	372155
Karimun	391618	349015	356972
Kepulauan Anambas	43788	35178	36560
Lingga	22146	30072	37492
Natuna	68704	47952	56417
Batam	974124	1084640	1147685

Tanjungpinang	161711	160470	148494
---------------	--------	--------	--------



### Lampiran 3

#### Data Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (dalam milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	SiLPA		
	2017	2018	2019
Asahan	84505	74153	19992
Batu Bara	86190	142631	127114
Dairi	121851	87947	124360
Humbang Hasundutan	126433	123920	139666
Karo	255011	350172	239680
Labuhan Batu	18279	89443	31766
Labuhanbatu Selatan	35798	53344	74394
Labuhanbatu Utara	93063	148755	95944
Langkat	130359	129610	264938
Mandailing Natal	48009	50393	117747
Nias	127169	92828	78483
Nias Barat	19015	26367	61716
Nias Selatan	120128	113461	108964
Nias Utara	11413	15346	58249
Padang Lawas	96178	58519	45698
Padang Lawas Utara	39413	19443	24126
Pakpak Bharat	34028	59238	59675
Samosir	31998	24437	50535

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>SiLPA</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Serdang Bedagai	89220	73662	70491
Simalungun	21908	21908	94616
Tapanuli Selatan	86720	117550	105492
Tapanuli Tengah	38653	100581	74617
Tapanuli Utara	60633	52582	70915
Toba Samosir	109466	44265	53370
Binjai	48625	6187	8660
Gunung Sitoli	43505	43507	39935
Padang Sidempuan	24510	9962	38966
Pematang Siantar	85004	65646	122522
Sibolga	34178	14389	43988
Tanjungbalai	34087	8626	4467
Tebing Tinggi	26455	31639	31954
Agam	59287	61958	65993
Dharmasraya	31647	23588	3893

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>SiLPA</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kepulauan Mentawai	13342	11835	29950
Lima Puluh Kota	72512	80874	39834
Padang Pariaman	26907	1877	57015
Pasaman	77724	79366	95681
Pasaman Barat	92724	54362	66763
Pesisir Selatan	91321	25246	16950
Sijunjung	132022	106038	92406
Solok	40367	34861	41821
Solok Selatan	19646	22004	66825
Tanah Datar	87018	79108	68257
Bukittinggi	85133	95915	114068
Padang	151190	108996	54784
Padang Panjang	128606	68909	47042
Pariaman	63727	54275	24345
Payakumbuh	99437	74547	60242
Sawahlunto	6814	4848	13369
Solok	150382	57684	59017
Banyuasin	74042	156687	157434
Empat Lawang	15896	26862	22789
Lahat	1944	84332	342943

Kabupaten/Kota	SiLPA		
	2017	2018	2019
Muara Enim	125172	283257	327465
Musi Rawas	47577	156378	206354
Musi Rawas Utara	54391	101911	48167
Ogan Ilir	30894	71845	125093
OKI	14772	310713	412352
OKU	94775	88123	145300
OKU Selatan	25480	54603	2614
OKU Timur	17809	27514	19371
Penukal Abab Lematang Ilir	31700	6238	25711
Lubuklinggau	1694	1323	832
Pagar Alam	6251	13427	42056
Prabumulih	28915	132769	171855
Lampung Barat	27586	40512	35251
Lampung Selatan	110587	189640	296856
Lampung Tengah	55714	139955	200010
Lampung Timur	101202	149849	195868
Lampung Utara	33752	7371	64437
Mesuji	26550	113703	109176
Pesawaran	59613	3526	13307
Pesisir Barat	81171	59406	68211

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>SiLPA</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pringseweu	44125	33994	44929
Tanggamus	16214	25395	55668
Tulang Bawang	35082	81552	78136
Tulang Bawang Barat (Tubaba)	23222	21522	54835
Way Kanan	25185	7964	-7658
Bandar Lampung	10408	8800	14271
Metro	106333	85589	106184
Bangka	93132	113604	130393
Bangka Barat	41421	86520	102879
Bangka Selatan	71716	42583	50224
Bangka Tengah	8085	27906	55724
Belitung	186842	212157	197095
Belitung Timur	71762	79951	100877
Pangkal Pinang	150671	181102	139994
Bintan	176143	213942	206170
Karimun	92355	26271	29278
Kepulauan Anambas	94076	57221	63983
Lingga	79939	137254	58665
Natuna	12600	69176	153479
Batam	65842	44408	35380



Tanjungpinang	25719	110283	64494
---------------	-------	--------	-------



#### Lampiran 4

#### Data Luas Wilayah (dalam Km<sup>2</sup>)

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		
	2017	2018	2019
Asahan	3702.21	3702.21	3702.21
Batu Bara	922.20	922.20	922.20
Dairi	1927.80	1927.80	1927.80
Humbang Hasundutan	2335.33	2335.33	2335.33
Karo	2127.00	2127.00	2127.00
Labuhan Batu	2156.02	2156.02	2156.02
Labuhanbatu Selatan	3596.00	3596.00	3596.00
Labuhanbatu Utara	3570.98	3570.98	3570.98
Langkat	6262.00	6262.00	6262.00
Mandailing Natal	6134.00	6134.00	6134.00
Nias	1842.51	1842.51	1842.51
Nias Barat	473.73	473.73	473.73
Nias Selatan	1825.20	1825.20	1825.20
Nias Utara	1202.78	1202.78	1202.78
Padang Lawas	3892.74	3892.74	3892.74
Padang Lawas Utara	3918.05	3918.05	3918.05
Pakpak Bharat	1218.30	1218.30	1218.30
Samosir	2069.05	2069.05	2069.05

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		
	2017	2018	2019
Serdang Bedagai	1900.22	1900.22	1900.22
Simalungun	4386.6	4386.6	4386.6
Tapanuli Selatan	6030.47	6030.47	6030.47
Tapanuli Tengah	2188	2188	2188
Tapanuli Utara	3791.64	3791.64	3791.64
Toba Samosir	2328.89	2328.89	2328.89
Binjai	59.19	59.19	59.19
Gunung Sitoli	280.78	280.78	280.78
Padang Sidempuan	114.66	114.66	114.66
Pematang Siantar	55.66	55.66	55.66
Sibolga	41.31	41.31	41.31
Tanjungbalai	107.83	107.83	107.83
Tebing Tinggi	31	31	31
Agam	1804.3	1804.3	1804.3
Dharmasraya	2961.13	2961.13	2961.13

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		
	2017	2018	2019
Kepulauan Mentawai	6011.35	6011.35	6011.35
Lima Puluh Kota	3571.14	3571.14	3571.14
Padang Pariaman	1332.51	1332.51	1332.51
Pasaman	3947.63	3947.63	3947.63
Pasaman Barat	3887.77	3887.77	3887.77
Pesisir Selatan	5749.89	5749.89	5749.89
Sijunjung	3130.4	3130.4	3130.4
Solok	3738	3738	3738
Solok Selatan	3346.2	3346.2	3346.2
Tanah Datar	1336.1	1336.1	1336.1
Bukittinggi	25.24	25.24	25.24
Padang	693.66	693.66	693.66
Padang Panjang	23	23	23
Pariaman	66.13	66.13	66.13
Payakumbuh	85.22	85.22	85.22
Sawahlunto	231.93	231.93	231.93
Solok	71.29	71.29	71.29
Banyuasin	11832.99	91592.43	91592.43
Empat Lawang	2256.44	2256.44	2256.44
Lahat	5311.74	5311.74	5311.74

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		
	2017	2018	2019
Muara Enim	7383.9	7383.9	7383.9
Musi Rawas	6350.1	6350.1	6350.1
Musi Rawas Utara	6008.55	6008.55	6008.55
Ogan Ilir	2666.09	2666.09	2666.09
OKI	18359.04	18359.04	18359.04
OKU	4797.06	4797.06	4797.06
OKU Selatan	5493.94	5493.94	5493.94
OKU Timur	3370	3370	3370
Penukal Abab Lematang Ilir	1840	1840	1840
Lubuklinggau	401.5	401.5	401.5
Pagar Alam	633.66	633.66	633.66
Prabumulih	251.94	251.94	251.94
Lampung Barat	2142.78	2142.78	2142.78
Lampung Selatan	700.32	700.32	700.32
Lampung Tengah	3802.68	3802.68	3802.68
Lampung Timur	5325.03	5325.03	5325.03
Lampung Utara	2725.87	2725.87	2725.87
Mesuji	2184	2184	2184
Pesawaran	2243.51	2243.51	2243.51
Pesisir Barat	2907.23	2907.23	2907.23

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		
	2017	2018	2019
Pringsewu	625	625	625
Tanggamus	3020.64	3020.64	3020.64
Tulang Bawang	3466.32	3466.32	3466.32
Tulang Bawang Barat (Tubaba)	1201	1201	1201
Way Kanan	3921.63	3921.63	3921.63
Bandar Lampung	296	296	296
Metro	61.79	61.79	61.79
Bangka	2950.68	2950.68	2950.68
Bangka Barat	2820.61	2820.61	2820.61
Bangka Selatan	3607.08	3607.08	3607.08
Bangka Tengah	2155.77	2155.77	2155.77
Belitung	2293.61	2293.61	2293.61
Belitung Timur	2506.91	2506.91	2506.91
Pangkal Pinang	89.4	89.4	89.4
Bintan	1318.21	1318.21	1318.21
Karimun	912.75	912.75	912.75
Kepulauan Anambas	590.14	590.14	590.14
Lingga	2266.77	2266.77	2266.77
Natuna	2009.04	2009.04	2009.04
Batam	960.25	960.25	960.25

Tanjungpinang	144.56	144.56	144.56
---------------	--------	--------	--------



## Lampiran 5

### Data Ukuran Legislatif (Jumlah Anggota DPRD)

Kabupaten/Kota	Ukuran Legislatif		
	2017	2018	2019
Asahan	45	45	45
Batu Bara	34	34	35
Dairi	35	35	35
Humbang Hasundutan	25	25	25
Karo	35	35	35
Labuhan Batu	45	45	45
Labuhanbatu Selatan	35	35	35
Labuhanbatu Utara	34	34	35
Langkat	50	50	50
Mandailing Natal	39	39	40
Nias	25	25	25
Nias Barat	20	20	20
Nias Selatan	35	35	35
Nias Utara	25	25	25
Padang Lawas	30	30	30
Padang Lawas Utara	30	30	30
Pakpak Bharat	20	20	20
Samosir	25	25	25



Kabupaten/Kota	Ukuran Legislatif		
	2017	2018	2019
Serdang Bedagai	45	45	45
Simalungun	50	50	50
Tapanuli Selatan	30	30	35
Tapanuli Tengah	35	35	35
Tapanuli Utara	35	35	35
Toba Samosir	30	30	30
Binjai	30	30	30
Gunung Sitoli	25	25	25
Padang Sidempuan	30	30	30
Pematang Siantar	30	30	30
Sibolga	20	20	20
Tanjungbalai	25	25	25
Tebing Tinggi	25	25	25
Agam	45	45	45
Dharmasraya	25	25	30

Kabupaten/Kota	Ukuran Legislatif		
	2017	2018	2019
Kepulauan Mentawai	20	20	20
Lima Puluh Kota	35	35	35
Padang Pariaman	40	40	40
Pasaman	35	35	35
Pasaman Barat	40	40	40
Pesisir Selatan	45	45	45
Sijunjung	30	30	30
Solok	35	35	35
Solok Selatan	25	25	25
Tanah Datar	35	35	35
Bukittinggi	25	25	25
Padang	45	45	45
Padang Panjang	20	20	20
Pariaman	20	20	18
Payakumbuh	25	25	25
Sawahlunto	20	20	20
Solok	20	20	20
Banyuasin	45	45	45
Empat Lawang	35	35	35
Lahat	40	40	40

Kabupaten/Kota	Ukuran Legislatif		
	2017	2018	2019
Muara Enim	45	45	45
Musi Rawas	40	40	40
Musi Rawas Utara	25	25	25
Ogan Ilir	40	40	40
OKI	45	45	45
OKU	35	35	35
OKU Selatan	40	40	40
OKU Timur	45	45	45
Penukal Abab Lematang Ilir	25	25	25
Lubuklinggau	30	30	30
Pagar Alam	25	25	25
Prabumulih	25	25	25
Lampung Barat	35	35	35
Lampung Selatan	50	50	50
Lampung Tengah	50	50	50
Lampung Timur	50	50	50
Lampung Utara	45	45	45
Mesuji	35	35	35
Pesawaran	45	45	45
Pesisir Barat	25	25	25

Kabupaten/Kota	Ukuran Legislatif		
	2017	2018	2019
Pringsewu	40	40	40
Tanggamus	45	45	45
Tulang Bawang	45	47	40
Tulang Bawang Barat (Tubaba)	30	30	30
Way Kanan	40	40	40
Bandar Lampung	50	50	50
Metro	25	25	25
Bangka	10	10	10
Bangka Barat	7	7	7
Bangka Selatan	6	6	6
Bangka Tengah	6	6	6
Belitung	5	5	5
Belitung Timur	4	4	4
Pangkal Pinang	7	7	7
Bintan	24	25	25
Karimun	30	30	30
Kepulauan Anambas	20	20	20
Lingga	20	20	20
Natuna	20	20	20
Batam	49	50	50

Tanjungpinang	30	30	30
---------------	----	----	----



## Lampiran 6

### Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	267	1066229	18411	1084640	109169.31	101522.865
SILPA	267	318371	-7658	310713	72350.70	56876.233
Luas Wilayah	267	18336.04	23.00	18359.04	2552.6916	2369.26850
Ukuran Legislatif	267	46	4	50	31.08	11.408
Anggaran Belanja Modal	267	658633	88587	747220	277571.66	108164.506
Valid N (listwise)	267					

## Lampiran 7

### Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

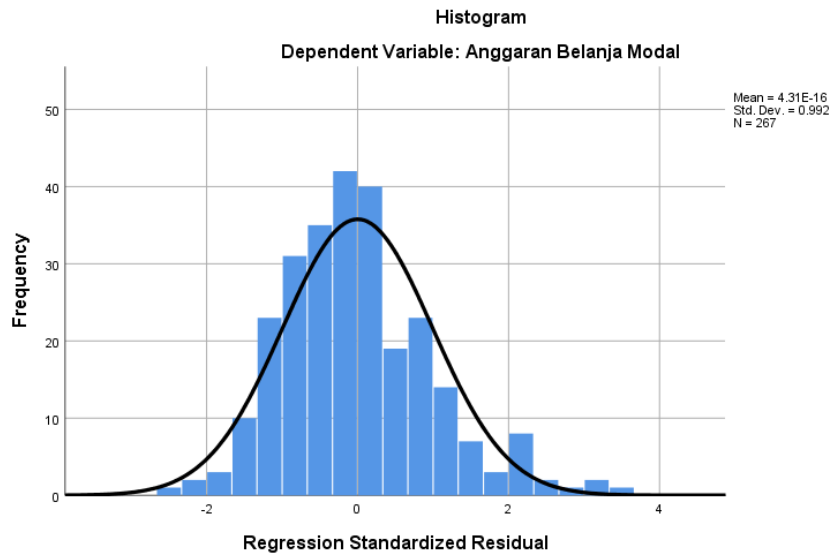
		Unstandardized Residual	
N		267	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	78136.48266	
Most Extreme Differences	Absolute	.074	
	Positive	.074	
	Negative	-.043	
Test Statistic		.074	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.093 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.086
		Upper Bound	.100

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.



## Lampiran 8

### Hasil Uji Multikolinearitas

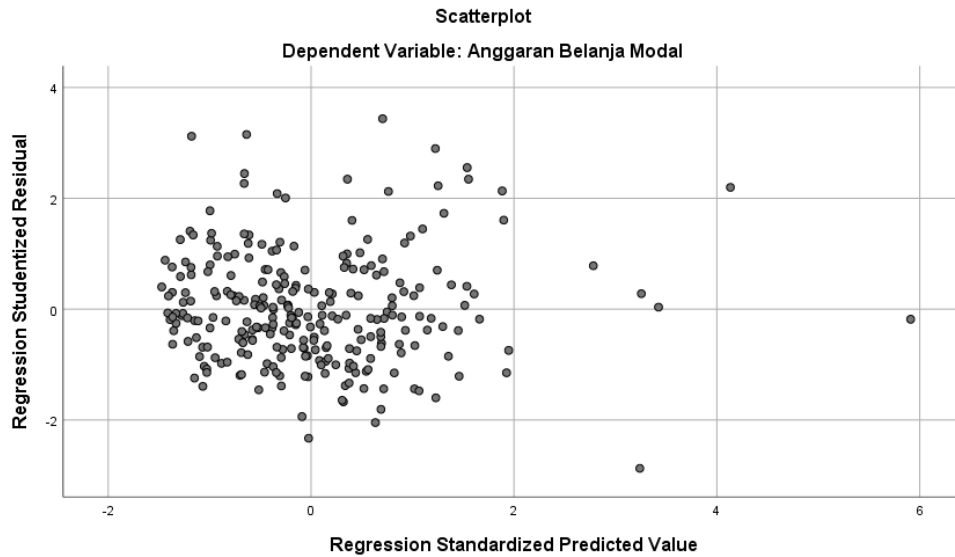
#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95680.755	15204.290		6.293	.000		
	PAD	.395	.050	.370	7.820	.000	.888	1.126
	SiLPA	-.021	.088	-.011	-.240	.811	.928	1.077
	Luas Wilayah	9.174	2.226	.201	4.122	.000	.838	1.193
	Ukuran Legislatif	3762.294	472.757	.397	7.958	.000	.801	1.248

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal

## Lampiran 9

### Scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas



## Lampiran 10

### Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 <sup>a</sup>	.478	.470	78730.685

a. Predictors: (Constant), Ukuran Legislatif, SiLPA, PAD, Luas Wilayah

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal



## Lampiran 11

### Hasil Uji t

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	95680.755	15204.290		6.293	.000
	PAD	.395	.050	.370	7.820	.000
	SiLPA	-.021	.088	-.011	-.240	.811
	Luas Wilayah	9.174	2.226	.201	4.122	.000
	Ukuran Legislatif	3762.294	472.757	.397	7.958	.000

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal

